

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SHARIAH* PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA

Rizki Ramadhana

UIN Sumatera Utara
rizki.ramadhana18021995@gmail.com

Muhammad Syukri Albani Nasution

UIN Sumatera Utara
muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

Maryam Batubara

UIN Sumatera Utara
maryam.batubara@uinsu.ac.id

Abstrak

The budget accountability model at the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service focuses on the output and outcomes obtained, starting from input in the form of evidence of financial transactions and documentation of activities which are then processed to prepare accountability reports. The accountability process is carried out by compiling, classifying, summarizing and presenting evidence of transactions which are input into the description of the accountability report. The resulting output is a prepared Accountability Report, and the resulting outcome is the performance of budget implementation in accordance with what was allocated and the trust of stakeholders. However, in practice, sometimes there are problems with delays in reporting accountability due to incomplete documents from other sectors or stakeholders. In general, budget accountability carried out by the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service has fulfilled the five objectives in the maqashid sharia concept, namely hifdz ad-din, hifdz an-nas, hifdz al-aql, hifdz al-mal, and hifdz an-nasb. However, the Islamic Sharia Service needs to carry out evaluations as future improvements in allocating budgets to programs or activities that have more urgency than other activity programs.

Keywords: *Accountability, Budget, Maqashid Shariah Perspective*

A. PENDAHULUAN

Penerapan akuntabilitas publik di Indonesia tidak merupakan sesuatu yang baru dan sebaiknya dilakukan secara utuh dalam lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas publik khususnya dalam konsep pengelolaan anggaran pemerintah disebabkan karena banyaknya penyelewengan dana dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai atau pejabat pemerintah.¹ Adapun

¹ Sayuti Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi, 'Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)', *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.1 (2018), 16–28 <<https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>>.

yang juga termasuk sebagai alasan lemahnya birokrasi sekaligus penyebab adanya bermacam penyimpangan administrasi dan pengelolaan keuangan adalah pemerintah yang tidak mampu menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di segala lini. Penerapan prinsip akuntabilitas bisa didasarkan atas wujud pertanggungjawaban yang terbuka pada setiap pihak yang turut terlibat di dalamnya.²

Akuntabilitas publik memiliki peranan penting menyangkut kelangsungan dan ketahanan dalam suatu Negara. Pernyataan ini tidak berlebihan karena akuntabilitas adalah syarat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemerintahan yang baik dari segi tata kelola pemerintahan terpenuhi.³ Akuntabilitas adalah alat atau media pengawasan masyarakat atas pemerintah ketika menggunakan dana masyarakat, sehingga agar dana tersebut menjadi lebih baik penggunaannya dan mencegah kecurangan ataupun korupsi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola anggaran masyarakat. Hal ini berarti krusial untuk pemerintah agar dapat menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi wujud akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, perlu adanya sebuah sistem pertanggungjawaban secara lebih jelas hingga kemudian penganggarannya dapat lebih efisien, efektif, serta tepat sasaran. Penelitian dari Melo menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepemimpinan merupakan solusi terbaik dalam praktiknya untuk menyediakan organisasi yang efektif dan efisien.⁴

Berbagai permasalahan terkait penganggaran ini merupakan akibat dari pelaksanaan pengawasan dan sistem kontrol yang sedemikian lemah. Maka pemerintah kemudian mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) demi terintegrasinya manajemen kinerja berikut manajemen keuangan (Anggaran Berbasis Kinerja) sekaligus menunjang untuk dilakukannya pengawasan dan pengendalian.⁵ Selain itu, akuntabilitas publik juga dapat berguna dan diperlukan untuk dapat mereduksi aktivitas kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan, hingga kegiatan korupsi, dan pemborosan anggaran. Implementasi sebuah konsep pertanggungjawaban haruslah dapat dilandasi kesadaran dari setiap pribadi yang mendapati keterlibatan di dalamnya.⁶

Dinas Syariat Islam merupakan salah satu Satuan Kinerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya dengan visi mewujudkan Pidie Jaya yang Islami (Pidiejayakab.go.id). Para pelaku ekonomi islam seharusnya menggunakan *Maqashid Syariah* untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menjadi pedoman yang akurat khususnya pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini disebabkan Dinas Syariat Islam mempunyai dimensi spiritual dengan prinsip masalah. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja organisasi menjadi lebih baik, dikarenakan dalam pelaksanaannya

² Desak Made Indah Paramitha Sari, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar', *Jurnal Akuntansi*, 11.1 (2022), 103–17 <<https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>>.

³ Hariyadi Hariyadi, 'Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Apbs) Berbasis Kinerja (Studi Empiris Di SMK Negeri Se-Kota Madiun)', *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4.1 (2015), 1 <<https://doi.org/10.25273/jap.v4i1.669>>.

⁴ P N Melo, A Martins, and M Pereira, 'The Relationship Between Leadership and Accountability: A Review and Synthesis of the Research', *Journal of Entrepreneurship Education*, 23.6 (2020).

⁵ Dendy Syaiful Akbar and Ruhayat, 'Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah', *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3.2 (2016), 93–106.

⁶ Nengsi Oktavia Makalew, Paulus Kombo Allo Layuk, and Ida Ayu Purba Riani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja Berbasis Kinerja Di Pemerintah Provinsi Papua Barat', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 6.1 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.52062/keuda.v6i1.1666>>.

masih terdapat kekurangan dana pada pelaksanaan suatu kegiatan yang mengganggu kinerja organisasi, sehingga *Maqashid Syariah* diharapkan menjadi indikator analisis untuk mengatasi masalah yang bisa meningkatkan efisiensi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana anggaran yang ada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan, mendeskripsikan atau menggambarkan secara kritis dan realistis fenomena yang sedang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan makna dalam konteks yang sebenarnya⁷. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang difokuskan pada topik penelitian tertentu, dimana hasil penelitian dibatasi pada topik penelitian. Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran yang akuntabel dalam perspektif *maqashid sharia* pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan studi dokumenter, wawancara, observasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk memperoleh data⁸. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-interaktif yang terdiri dari tiga aliran kegiatan yang berjalan secara bersamaan yaitu; Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

Terkait dengan proses penganggaran yang baik tentu akan ditunjang hingga ketika saatnya juga akan menunjang bermacam pilar pemerintahan publik modern, yaitu: integritas, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan dan pendekatan strategis agar perencanaannya dapat mencapai tujuan secara nasional. Selain itu, penganggaran tersebut juga turut menjadi kunci penting pada proses arsitektur kepercayaan yang dibentuk negara dengan warga negara ketika mengelola anggaran Oleh karena itu, penting artinya untuk instansi dalam mendorong pembentukan suatu pola penganggaran secara efektif melalui pelibatan elemen terkait secara keseluruhan. Pada hakikatnya, terdapat sejumlah empat poin dalam penganggaran yang dimaksudkan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta akan dijelaskan melalui uraian berikut:

a) Perencanaan

Dinas Syariat Islam merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpotensi cukup strategis di Kabupaten Pidie Jaya, pastinya memerlukan anggaran yang tidak sedikit dengan kekhususan daerah Aceh yang menerapkan syariat Islam. Keadaan ini, kemudian menuntut pemma Pidie Jaya lewat Dinas Syariat Islam untuk dapat menyusun Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) untuk mengoptimalkan pelaksanaan

⁷ Aisyah Sayuti, Husaenie & Hidayati, 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat', *Jurnal RESIPROKAL*, 2.2 (2020).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).

syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan keadaan yang disampaikan, perencanaan anggaran bagi syariat Islam diharuskan dapat sejalan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya serta juga dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang sudah menjadi ketentuan Pemerintah Pusat, selain itu juga harus dapat berjalan dengan terstruktur, sesuai dengan temuan penelitian berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya :

Pada DSI (Dinas Syariat Islam) awalnya penganggaran dimulai dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat desa, kemudian berlanjut ke tingkat musrenbang kecamatan, seterusnya musrenbang Kabupaten. Kemudian dari proses tersebut, Dinas Syariat Islam mengeluarkan Rencana Kerja Anggaran hingga akhirnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran. (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Berdasarkan *statement* dari Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya dapat kita ketahui bahwa perencanaan anggaran tidak dilakukan secara statis dengan serta merta oleh Dinas Syariat Islam secara sepihak, namun perencanaan anggaran bersifat dinamis mulai dari tingkatan masyarakat desa bertahap hingga sampai ke tingkatan kabupaten. Sejalan dengan hal ini, juga relevan dengan pernyataan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya yang menyampaikan :

Untuk Perencanaan Anggaran itu disesuaikan dengan usulan dan proposal dari masyarakat untuk diverifikasi oleh bidang-bidang yang disandingkan sesuai dengan program kegiatan yang ada pada Dinas Syariat Islam (Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Pernyataan dari Kasubbag. Keuangan ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan anggaran yang bersifat dinamis yang disesuaikan dengan saran usulan dari kebutuhan masyarakat akan tetapi berjalan dengan proses verifikasi untuk kemudian dapat didiskusikan bersama dalam lingkungan birokrasi Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memeriksa validitas dari informasi yang diberikan beberapa narasumber sebelumnya, mengenai perencanaan anggaran yang dilaksanakan Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Peneliti selanjutnya meminta konfirmasi kepada salah satu penerima Bantuan Sosial Keagamaan dari Dinas Syariat Islam :

Dinas Syariat Islam memang sering mengecek bagaimana perkembangan masjid dan pesantren kami. Kemudian juga sering di ajak berdiskusi dengan program yang harus dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Jadi kami masyarakat merasa dilibatkan untuk perencanaan program Dinas Syariat Islam (Abdullah, Masyarakat).

Menurut hasil dari konfirmasi tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan perencanaan anggaran secara akuntabel sebagaimana konsep dalam *Sharia Enterprise Theory* yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban dan amanah kepada seluruh pihak yang berkepentingan dari tingkatan tertingginya yaitu Bupati Kabupaten Pidie Jaya sampai tingkatan level bawah yaitu masyarakat secara umum, terutama pada sektor pelaksanaan syariat Islam. Kondisi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban horizontal yaitu terhadap sesama

manusia, yang tidak langsung menjaga amanah yang mengarah pada tanggung jawab secara vertikal sebagaimana diterangkan oleh Q.S Al-Baqarah ayat 30 berikut ini:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Menurut ayat ini dijelaskan bahwa manusia harus dapat mempertanggungjawabkan setiap hal dari dirinya, khususnya dengan amanah yang menjadi tanggungjawabnya, yang terkait dengan upaya melaksanakan dan mengelola anggaran pemerintah sebagai usaha untuk menjamin penggunaan kekayaan negara dengan semakismal mungkin untuk kebutuhan Masyarakat, yang dalam hal ini di Kabupaten Pidie Jaya. Di satu sisi, Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan bahwa telah melakukan pengelolaan anggaran dengan setransparan mungkin melalui penyediaan ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu langkah yang digunakan untuk mengatur, penetapan, dan penggolongan apa saja kegiatan yang ada dalam suatu organisasi misalnya dengan penetapan wewenang ataupun tugas seseorang, dan pendelegasian guna mendorong tercapainya tujuan organisasi. Pengorganisasian juga sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sebagaimana sumber-sumber, tujuan, berikut kondisi lingkungannya. Sebagaimana perencanaan, pengorganisasian juga memiliki peran penting, karena dalam pengorganisasian seluruh sumber daya baik manusia, materi, maupun sumber daya yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk jalannya roda organisasi/instansi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Berkaitan hal ini, pengorganisasian anggaran di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan bisa disebut sudah berlangsung secara baik, sebab sudah ditetapkan, diatur dengan baik dan juga disajikan pada Masyarakat secara umum. Pernyataan ini sebagaimana yang disampaikan pada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya :

Untuk pengorganisasian anggaran itu sendiri, setelah adanya musrenbang dari level desa hingga kabupaten kita dapati berbagai usulan dari masyarakat dan setelah adanya penjabaran anggaran yang dikeluarkan oleh BPKK nantinya saya akan meminta untuk setiap bidang menyusun RKA (Rencana Kinerja Anggaran) karena bidang tentunya yang lebih paham spesifik dengan program kegiatannya tentunya. (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Penjelasan yang disampaikan di atas telah relevan atas konsep *sharia enterprise theory* yang disampaikan Prof. Iwan Triyono dalam pengembangan akuntansi syariah dengan mengacu kepada akuntabilitas yang lebih kompleks melalui pengaitan terhadap akuntabilitas paling tinggi yaitu kepada tuhan, kemudian kepada manusia. Dalam

lingkupnya menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung bersinggungan dengan alam dan tentunya terlibat langsung dalam pelaksanaan ajaran tuhan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sudah sewajarnya memiliki tanggungjawab secara masif pada aspek ini menjadi bagian atas pelaksanaan *amanah* Allah SWT selaku institusi yang mengarahkan pada pelayanan dan kereligiusan masyarakat. Dalam praktiknya, upaya pengorganisasian pengorganisasian atas anggaran ini juga dijelaskan Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya secara singkat dengan menyampaikan:

Pada setiap dinas atau SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) masing-masing ada PAGU anggarannya, nanti disitu akan ditentukan berapa jumlah anggaran yang diterima oleh setiap dinas. Kemudian dari anggaran itu dipecah lagi ke beberapa bidang yang ada disini. (Junaidi Hamid, S.Sos.I, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Sekretaris Dinas Syariat Islam ini menerangkan bahwa anggaran dari pemerintah daerah pada setiap dinas akan dibagi lagi kepada setiap bidang yang ada pada Dinas Syariat Islam, tentunya pembagian anggaran sesuai program kerja yang dapat dilaksanakan dan merujuk kepada kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran yang ada pada periode sebelumnya.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran tersebut bukan hanya dengan mengikuti prosedural saja, namun juga menjaga kepercayaan *stakeholder* seperti telah dijelaskan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

“Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan apa yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kita itu terus usaha untuk memberikan yang terbaik dan melibatkan masyarakat dalam tiap kegiatan yang akan dikerjakan juga memberi kesempatan untuk masyarakat memberi kritik dan saran untuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas” (Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Sebagaimana penjelasan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Syariat Islam dengan merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang memuat secara rinci anggaran yang akan dilaksanakan berdasarkan program kegiatan Dinas Syariat Islam. Dalam upaya menjalankan yang terbaik dalam pelaksanaan anggarannya, dinas juga mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan yang hendak dikerjakan sehingga anggaran yang dilaksanakan tidak mendapat masalah yang berdampak serius untuk menjaga kepercayaan berbagai pihak.

d) Pengendalian

Pengendalian anggaran dilaksanakan karena memiliki tujuan atas perencanaan dan implementasinya secara baik hingga kemudian bisa memenuhi tujuan ataupun target yang hendak diraih. Pengendalian anggaran begitu berperan penting dalam mendukung pemeriksaan kesalahan berikut penentuan tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atas acuan yang berlaku dan memastikan bahwa tujuan institusi sudah berjalan secara baik. Pengendalian anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya yaitu dengan senantiasa mendorong pelibatan masyarakat pada setiap pelaksanaannya, hingga masyarakat dalam hal ini turut

dimungkinkan mendukung pengawasan atas program kerja yang dijalankan secara langsung seperti pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya:

“Pengendalian anggaran yang dilakukan pada Dinas Syariat Islam dilakukan dengan berusaha melibatkan komponen masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan juga memberi kesempatan untuk masyarakat pula mengambil peran dalam realisasi anggaran untuk menjaga kepercayaan berbagai pihak dan masyarakat itu sendiri” (Junaidi Hamid, S.Sos.I, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Dari pernyataan Sekretaris Dinas Syariat Islam ini dijelaskan bahwa melalui pelibatan aktif masyarakat secara terus menerus pada proses pelaksanaan dan pengendalian anggaran dapat dinilai sebagai pilihan terbaik untuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah terkait penganggaran. Selain itu, dimungkinkan pula bagi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya melalui adanya pelibatan Masyarakat ini untuk dapat menjalankan pengelolaan anggaran dengan jujur dan adil dalam rangka mendukung pengendalian anggaran dan meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan terkait pengelolaan anggaran hingga dapat semakin mendorong tercapainya tujuan institusi.

2. Model Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

Dalam penerapannya, diperlukan implementasi aspek transparansi dan akuntabilitas agar tercapai ketepatan sasaran dan tujuan anggaran. Adapun untuk kedua komponen tersebut merupakan wujud tanggung jawab atas anggaran yang terkait dengan permasalahan akuntabilitas pemerintah secara efektif dan efisien yang bertujuan menunjang pemerintahan secara rasional dan sistematis pada proses pengelolaan anggaran. Berkenaan hal ini, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam penjelasannya menyiratkan bahwa akuntabilitas pada satuan kerja yang beliau pimpin telah dilaksanakan dengan baik. Dalam penuturannya :

“Alhamdulillah selama ini akuntabilitas selalu kita jaga agar anggaran sesuai dengan koridor yang telah direncanakan, Dinas Syariat Islam setiap tahun juga melaporkan akuntabilitasnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Syariat Islam ini dapat digambarkan bahwa reformasi birokrasi pada Dinas Syariat Islam dapat dikatakan sudah cukup baik pelaksanaannya, hingga kemudian proses mengelola keuangan dalam satuan kerja terkait sudah sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkenaan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran yang ada dalam Dinas Syariat Islam sendiri, dapat dikategorikan dalam beberapa tahapan sebagaimana diuraikan berikut ini :

a) Input

Input merupakan bahan atau seluruh sumber daya yang termuat pada suatu proses tertentu, yang bisa berwujud dokumen, faktur, atau berbagai hal lain seperti dalam penjelasan dari narasumber Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya:

“Untuk input dari pertanggungjawaban disini itu macam- macam ya, itu tergantung apa yang jadi kegiatannya, contohnya seperti nota dari setiap dana yang dicairkan, atau foto dokumentasi kegiatan yang dikerjakan” (Junaidi Hamid, S.Sos.I, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Pada dasarnya model akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan mempunyai ragam bentuk yang seharusnya disesuaikan dengan apa yang diprogramkan atau masing-masing bidang kegiatan dari satuan kerja instansi. Berbagai bentuk pertanggungjawaban itu mencakup keuangan program dan output dari institusi itu sendiri. Di dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan daerah dikenal istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rujukan tanggung jawab atas instansi pemerintah termasuk pemerintahan daerah.

b) Proses

Dijelaskan bahwa proses merupakan rangkaian aktivitas yang melalui perancangan untuk mengubah atau mengalokasikan suatu input agar dapat berubah sebagai output. Dalam praktiknya proses dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bukti dari kegiatannya. Proses pada Dinas Syariat Islam dijelaskan melalui penjelasan Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya sebagai berikut :

“Proses Akuntabilitas anggaran yang dilaksanakan melibatkan masyarakat, dari mulai proses anggarannya kita menunggu usulan dari usulan musrembang desa, kecamatan, hingga kabupaten, hasil dari Kabupaten dirangkum oleh BAPPEDA baru kemudian dibagikan ke dinas” (Drs Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya)

Penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Pidie Jaya ini sebagaimana pula dalam penjelasan *Sharia Enterprise Theory*. Sebagai Satuan Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan penerapan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sudah seharusnya bertanggung jawab secara masif pada dua komponen terkait untuk menjadi bagian atas implementasi amanah dari Allah SWT dan menjadi institusi yang bertanggungjawab menegakkan syariat Islam. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui apa saja unsur pada proses terkait, yakni Dinas Syariat Islam tersebut berikut birokrasi pemerintahan daerah dan masyarakat lewat mekanisme musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

c) Output dan Outcome

Output merupakan hasil yang secara langsung bisa diperleh melalui sebuah proses, sementara untuk *Outcome* merupakan dampak dalam jangka panjang atas adanya proses yang dilalui yang berwujud perubahan atau manfaat. Output pada akuntabilitas Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya merupakan sebuah Laporan Akuntabilitas dengan pembuatan sebagaimana acuan yang pemerintah tetapkan. Kendati dalam praktiknya terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat masalah seperti dijelaskan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya :

“Masalahnya kadang LPJ dari masing-masing bidang itu gak lengkap, jadi Lapornya terkendala dan perlu waktu lebih lama untuk nyusunnya” (Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya)

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa skema akuntabilitas yang baik itu tidak selalu berlangsung dengan sempurna karena terdapat masalah sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut. Untuk mengkonfirmasi pernyataan ini peneliti selanjutnya menanyakan kepada masyarakat mengenai akuntabilitas yang ada pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya selaku penerima bantuan/manfaat dari Dinas Syariat Islam :

Dinas Syariat Islam sejauh ini terbuka dengan kita, apa yang disampaikan pada kami, menurut kami itu apa adanya, ada anggaran sekian ya memang segitu yang diberikan, tidak ada pungli yang diminta, kepercayaan masyarakat disini juga bagus terhadap Dinas Syariat Islam, harapan kami ini bisa terus dipertahankan (Abdullah, Masyarakat).

Jawaban dari Bapak Abdullah menunjukkan bahwa pada dasarnya sudah cukup baik akuntabilitas yang dijalankan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan tingkat masyarakat yang juga dianggap cukup partisipatif, berikut juga sudah transparan sebagaimana tata kelola dari instansi pemerintahan secara baik. Adapun hal inilah yang kemudain harus dapat dijaga kinerjanya dan juga berkelanjutan serta menjaga kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari dampak yang dirasakan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif *Maqashid Syariah* pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

Adapun akuntabilitas berdasarkan perspektif islam termasuk sebagai kajian mengenai serangkaian norma positif yang mendiskusikan berkenaan dengan seperangkat nilai ketuhanan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT dalam keseharian manusia. Sehingga dalam islam, akuntabilitas memiliki tujuan utama yang tidak hanya memfokuskan pada kehidupan duniawi, namun juga tetap berikhtiar dalam mencapai kehidupan ukhrawi yang memiliki nilai intrinsik jangka panjang. Akuntabilitas dalam perspektif islam memiliki karakteristik yang turut meliputi pembangunan masyarakat, keadilan dan kepedulian sosial pada organisasi, juga pemenuhan kesamaan hak menyatakan pemikiran antarelemennya. Berkenaan hal ini Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya mengemukakan penjelasannya :

“Tentu saja kritik terhadap kinerja kami itu tetap ada dari masyarakat, untuk memperbaikinya kami terbuka untuk duduk bersama dengan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.” (Junaidi Hamid, S.Sos.I, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Penjelasan dari Sekretaris Dinas Syariat Islam ini menunjukkan bahwa akuntabilitas islam pada dasarnya sudah diterapkan di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam kaitannya dengan keadilan sosial, pembangunan masyarakat, dan kesetaraan suara. Apabila hubungkan terhadap konsep *maqashid syariah*, bahwa yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sudah sesuai dengan tujuan utama *maqashid syariah* yang terbagi dalam lima bentuk tersebut.

a) *Hifz ad-din* (Memelihara Agama)

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap penerapan *hifz ad-din* dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, terdapat beberapa program kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan memelihara agama, diantaranya :

- (1) Penyelenggaraan Pengajian di Gampong (Desa)
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah
- (3) Penyebaran Informasi Keislaman
- (4) Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam

Namun berdasarkan temuan penelitian, anggaran yang diberikan kepada program kegiatan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan anggaran keseluruhan yang tersedia. Selain itu, Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya menerapkan *hifz ad-din* dengan menyediakan fasilitas tempat ibadah bagi pegawainya untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu serta memberikan waktu istirahat kepada pegawainya untuk dapat melaksanakan ibadah tepat waktu. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya berikut:

“Namanya kita Dinas Syariat Islam tentu kita menganggarkan pada aspek ini, ada beberapa program kita, nanti bisa dilihat sendiri di DPA seperti pengajian gampong dan lain-lain itu menjadi program rutin yang sudah ada sejak lama, kita pun pegawai kalau waktunya shalat aktivitas kerja berhenti dulu” **(Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya)**

Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya juga mengimplementasikan perilaku-perilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat islam agar tetap bisa mempertahankan konsistensi dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi, serta pegawainya terus berusaha memelihara amanah dengan cara tetap menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat dalam bentuk kewajiban menjaga akuntabilitas. Dari hal ini dapat tercerminkan bahwa amanah yang telah dijaga menunjukkan sifat kecerdasan (*fathanah*) yang beriringan dengan pengamalan sifat (*shiddiq*) yang mana Dinas Syariat Islam memberitahukan kendala-kendala yang dihadapi secara transparan. Perwujudan dari hal-hal tersebut disampaikan oleh narasumber kita sebagai berikut:

Menurut saya pak Dinas Syariat Islam sudah transparan, terkait anggaran yang diberikan berapa dan saat pelaksanaannya berapa menurut kami sudah sesuai tidak terkesan menutupi supaya kami tidak tahu, misalnya ada anggaran segini begitulah pula yang kami dapat **(Abdullah, Masyarakat).**

Untuk lebih mengerucut pada penerapan *hifdz ad-din* (memelihara agama) terhadap sifat *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatanah* peneliti menguraikan temuannya sebagai berikut :

- (1) Penerapan *hifdz ad-din* (memelihara agama) terhadap sifat *shiddiq* (jujur) yaitu dengan membentuk instansi untuk secara terbuka dan jujur dalam jumlah alokasi, realisasi, dan selisih anggaran secara rinci dan transparan.
- (2) Penerapan *hifdz ad-din* (memelihara agama) terhadap sifat *amanah* (dapat dipercaya) yaitu dengan menerapkan kinerja pegawai di Dinas Syariat Islam untuk terus menjaga pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya yang terbuka bagi setiap pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Penerapan *hifdz ad-din* (memelihara agama) terhadap sifat *tabligh* (menyampaikan) yaitu dengan kesediaan instansi menyampaikan alokasi dan pengeluaran anggaran kepada masyarakat.
- (4) Penerapan *hifdz ad-din* (memelihara agama) terhadap sifat *fatanah* (cerdas) yaitu dengan bagaimana Dinas Syariat Islam membuat sistem dari

akuntabilitas anggaran yang efisien dan juga efektif untuk mewujudkan pengelolaan instansi yang terus menjaga agar tidak terjadinya kebocoran anggaran.

b) *Hifz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, peneliti menemukan bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah menjaga atau memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dengan memberikan jerih kepada khatib dan imam masjid serta guru pengajian secara tepat waktu sesuai dengan kinerjanya, begitu juga dengan para pegawainya diberikan gaji dan juga tunjangan sesuai dengan kedisiplinan dan tentunya kinerja yang diberikan serta program jaminan kesehatan, sebagaimana pernyataan dari narasumber :

Memang kita tidak ada program khusus untuk ini menurut saya, tapi sebisa mungkin kita tepat waktu memberikan upah untuk pegawai, imam masjid, guru ngaji, dan lain-lain untuk menjaga kebutuhan mereka, dan juga untuk pegawai yang sakit akan ditanggung biayanya oleh BPJS (Junaidi Hamid, S.Sos.I, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya memelihara jiwa instansi dari sifat serakah dengan konsisten untuk tetap peduli dan mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan mengajak masyarakat dalam proses penyusunan program yang ada pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri. Menjaga atau memelihara jiwa dalam islam merupakan implementasi sifat *fathanah*, dikarenakan hal ini menjadi proses dari menjaga amanah berkenaan dengan transparansi anggaran melalui partisipasi dari masyarakat, Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yang diwawancarai :

“Tentu, kami itu terus diawasi oleh Dinas Syariat Islam, Dinas Syariat Islam tidak serta merta ngasih anggaran ke kami. Kami juga diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban ke Bupati melalui Dinas Syariat Islam, apa saja yang jadi pengeluaran kami, kami laporkan dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Kami tidak berani main curang dengan dana negara. Intinya Dinas Syariat Islam telah mengawasi dan mengelola anggaran dengan baik” (Abdullah, Masyarakat).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* sebagai keberlangsungan kebaikan sekaligus dalam menghindari keburukan yang telah diimplimentasikan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil sebanyak-banyaknya manfaat begitu juga meminimalisir semaksimal mungkin mudharat dari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan. Oleh karena itu *maqashid syariah* dalam hal ini memastikan pemblokiran aspek-aspek dan sarana-sarana yang bisa berdampak pada wewenang yang disalahgunakan dan mencapai tujuan-tujuan yang illegal serta sebaliknya berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang berlandaskan islam secara maksimal.

c) *Hifz al-‘aql* (Memelihara Akal)

Dari temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah menerapkan *hifz al-‘aql* (memelihara akal) dalam akuntabilitas pengelolaan anggarannya yang bermakna bahwa Instansi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah mengalokasikan anggaran secara

bertanggungjawab terhadap pemenuhan tujuan syariah tersebut (memelihara akal). Dalam implementasinya program kegiatan yang berorientasi pada *hifz al-‘aql* pada Dinas Syariat Islam adalah:

- (1) Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam,
- (2) Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran, dan
- (3) Pelaksanaan MTQ

Selain itu dari sisi internalnya, Dinas Syariat Islam juga mengikutsertakan pegawai-pegawainya dalam mengikuti pelatihan, seminar atau bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawainya. Tidak hanya bagi internal kepegawaiannya, Dinas Syariat Islam juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat dengan memberikan edukasi – edukasi penegakan syariat islam seperti Penguatan dan Sosialisasi Qanun LKS, Jum’at Tertib, Tajhiz Mayit, dan lain sebagainya yang dapat memelihara akal masyarakat agar tetap terjaganya eksistensi akal dihadapan tuhan selaku stakeholder tertinggi.

Pada dasarnya dalam mencapai tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga akal sama dengan menjaga kecerdasan yang merupakan amanah dari Allah SWT. Dinas Syariat Islam secara keseluruhan telah menerapkan pemenuhan fungsi anggaran dalam menjaga akal yang merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi titipan dari Allah SWT. Berkenaan dengan penjelasan ini, Kasubbag. Keuangan dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya menyatakan bahwa:

“Untuk tujuan maqashid syariah yang anda maksud dalam menjaga akal, di dinas ini kami menjaga akal atau pikiran dari segala sesuatu niat yang kurang baik agar nantinya dalam akuntabilitas anggaran tidak terjadi penyimpangan” **(Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).**

Dengan penjelasan yang lebih spesifik, uraian penerapan *hifz al-aql* (memelihara atau menjaga akal) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya terhadap sifat *shiddiq, amanah, tabligh, dan fatanah* adalah sebagai berikut :

- (1) Penerapan dari memelihara atau menjaga akal (*hifz al-‘aql*) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya terhadap sifat *shiddiq* (jujur) adalah dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggarannya senantiasa bersikap jujur, seperti dalam mengirim delegasi untuk MTQ dan pemilihan tenaga keagamaan untuk dikirim sebagai perwakilan Pidie Jaya dalam mengikuti pelatihan selalu memilih yang benar-benar berkompeten dan memenuhi syarat, tidak karena ada unsur kedekatan atau pengaruh buruk yang lain.
- (2) Penerapan dari *hifdz al-‘aql* (memelihara akal) terhadap sifat *amanah* (dapat dipercaya) yaitu dengan Dinas Syariat Islam menjaga amanah terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- (3) Penerapan dari *hifdz ad-‘aql* (memelihara akal) terhadap sifat *tabligh* (menyampaikan) yaitu dengan tetap bertanggung jawab memberi edukasi bagi masyarakat dengan alokasi anggaran yang ada.
- (4) Penerapan dari *hifdz ad-‘aql* (memelihara akal) terhadap sifat *fatanah* (cerdas) yaitu instansi tetap komitmen berfokus dalam menggunakan anggaran dalam mencerdaskan masyarakat dalam memahami syariat islam, seperti dengan program edukasi bagi masyarakat, pelatihan kader MTQ, tenaga keislaman, dan lain-lain.

d) *Hifz al-mal* (Memelihara Harta)

Dalam membahas hasil atau temuan penelitian bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya terhadap salah satu *maqashid syariah* yaitu memelihara atau menjaga harta memiliki kaitan dengan etika bisnis atau etika bermuamalah. Memelihara atau menjaga harta harus menghindari terkait dengan hal-hal yang dilarang dan tidak diridhai oleh Allah SWT. Harta yang dimaksudkan disini adalah bagaimana Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya mendistribusikan harta berupa anggaran sarana dan prasarana dengan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau dianggarkan. Dalam implementasi atau penerapannya program kegiatan yang berorientasi dalam memenuhi pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) ini adalah, diantaranya :

- (1) Penyediaan, Pendistribusian, dan Pengawasan Sarana Peribadatan, dan
- (2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan

Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya pada dasarnya dalam mendistribusikan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana keagamaannya telah menyampaikan kepada *stakeholder* terkait tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, apa yang harus dilaksanakan, dan apa saja prosedur yang harus dipenuhi secara transparan, namun terkadang dalam praktiknya terkait akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang diminta biasanya terdapat pihak-pihak yang terlambat dalam memenuhi tanggungjawabnya sehingga terjadi kendala atau keterlambatan dalam realisasi distribusinya. Dalam memperbaiki hal ini Dinas Syariat Islam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program-program kegiatan yang dijalankan. Terkait dengan urgensi pentingnya menjaga atau memelihara harta pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dijelaskan oleh Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya :

“Menjaga atau memelihara harta pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya selalu mengedepankan pertanggungjawaban yang baik dalam setiap pencairan dananya, kami tidak akan mengeluarkan SPM jika laporan yang diberikan untuk pengerjaan kegiatan tidak memenuhi syarat, nantinya setiap bidang akan kami beritahukan kekurangannya apa saja untuk diperbaiki dan disampaikan pada stakeholder”
(Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

e) *Hifz an-nasb* (Memelihara Keturunan)

Dalam membahas hasil atau temuan penelitian bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya terhadap salah satu *maqashid syariah* yaitu memelihara atau menjaga keturunan memiliki kaitan dengan pembinaan keluarga. Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah menerapkan *hifz an-nasb* dengan cara mengalokasikan anggaran pada program kegiatan yang berorientasi pada penjagaan keluarga dari sifat mungkar dengan terus melakukan pembinaan pada kegiatan terkait dan tetap mempedomani nilai-nilai moral. Karena jika ini tidak dilakukan maka eksistensi atau keberadaan keturunan dapat terancam dengan tidak memenuhi kriteria sebagai generasi yang mempedomani dan menjalankan syariat agama islam. Dalam implementasi atau penerapannya program kegiatan yang berorientasi dalam

memenuhi pemeliharaan atau penjagaan keturunan (*hifz an-nasb*) ini adalah, diantaranya pembinaan keluarga Islami dalam lingkup Kabupaten Pidie Jaya.

“Pelaksanaanya kita fokuskan pada ada satu program kita yaitu pembinaan keluarga Islami disini kita kerjasama dengan BKMT” (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya)

D. KESIMPULAN

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam perspektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan. Akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi lima tujuan dalam konsep *maqashid syariah* yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nas*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz an-nasb*. Hanya saja, Dinas Syariat Islam perlu melakukan evaluasi sebagai perbaikan ke depan dalam pengalokasian anggaran pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai urgensi lebih dibanding dengan program kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, Inge, M Ridwan, and Maryam Batubara, ‘Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating’, 6, 17–26
- Akbar, Dendy Syaiful, and Ruhayat, ‘Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah’, *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3 (2016), 93–106
- Asmarani, Marlia, and Rohmawati Kusumaningtias, ‘Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt’, *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8 (2019)
- Hakimi, A. R., ‘Accountability Of The Afghan Government From Maqasid Perspective: Five Necessities Of Human Survival’, *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1 (2022), 53–55
- Hariyadi, Hariyadi, ‘Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Apbs) Berbasis Kinerja (Studi Empiris Di SMK Negeri Se-Kota Madiun)’, *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4 (2015), 1 <<https://doi.org/10.25273/jap.v4i1.669>>
- Kamaluddin, Santrio, ‘Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang’, *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019), 222–28 <<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>>
- M. Nafarin., *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- Makalew, Nengsi Oktavia, Paulus Kombo Allo Layuk, and Ida Ayu Purba Riani, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja Berbasis Kinerja Di Pemerintah Provinsi Papua Barat’, *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 6 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.52062/keuda.v6i1.1666>>

- Melo, P N, A Martins, and M Pereira, 'The Relationship Between Leadership and Accountability: A Review and Synthesis of the Research', *Journal of Entrepreneurship Education*, 23 (2020)
- Padli, M. Syaiful, Nur Diana, and Afifudin, 'Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Bank Syariah Di Indonesia', *E-Jra*, 07 (2019), 119–31
- Paramitha Sari, Desak Made Indah, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar', *Jurnal Akuntansi*, 11 (2022), 103–17 <<https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>>
- Pirngadi, Rsud, Kota Medan, Azhari Akmal Tarigan, and Syukri Albani Nasution, 'Pengaruh Kompensasi , Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja Dan Perspektif Maqashid Syariah Pada', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022), 2995–3002
- Ramadhan, Mohammad Iqbal Bagus, Ahim Abdurahim, and Hafiez Sofyani, 'Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6 (2018), 5–18
- Rivan, Arif, and Maksum I, 'Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management', *Public Administration Journal*, 9 (2019), 92–100 <<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>>
- Sayuti, Husaenie & Hidayati, Aisyah, 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat', *Jurnal RESIPROKAL*, 2 (2020)
- Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi, 'Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)', *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (2018), 16–28 <<https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>>
- Sofyani, H, UNNA Ali, and D Septiari, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5 (2020), 325–59
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017)